

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dirujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, berikut uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Arya Paradipta (2011)

Penelitian yang dilakukan Arya Paradipta ini membahas tentang Analisis Pengaruh dari Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini mencoba meneliti kembali dari berbagai mekanisme *corporate governance* terhadap perilaku *earning management* dengan menggunakan data perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berada di Bursa Efek Jakarta. Dengan hasil kesimpulan, sebagai berikut :

1) Institutional Investor tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management*, 2) Prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer yang ikut mengelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management*, 3) Jumlah anggota dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap *earning management*, 4) Susunan komite audit yang sesuai dengan peraturan BEJ tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management*.

Persamaan:

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu sama – sama meneliti mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba, dan terdapat kesamaan beberapa proksi, seperti: Institutional Investor (Kepemilikan Institusional), Prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer (Kepemilikan Manajer).

Perbedaan :

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sample yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2004 dan tidak tergolong perusahaan industri pertanian, pertambangan, property transportasi, keuangan, jasa, serta konstruksi.

2. Eka Sefiana (2009)

Penelitian yang dilakukan Eka Sefiana ini bertujuan untuk melakukan mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap tindakan manajemen laba (*earning management*). Kesimpulan yang diperoleh peneliti, yaitu : 1) Proporsi komisaris independen pada perusahaan tidak berpengaruh, 2) Ukuran dewan komisaris pada perusahaan tidak berpengaruh, 3) Keberadaan komite audit pada perusahaan tidak berpengaruh. Jadi, tiga variable pengukuran yang digunakan oleh peneliti terdahulu tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Sample

yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan perbankan yang telah *go public* di BEI pada tahun 2007 – 2008.

Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini, yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Dan menggunakan proksi *corporate governance* yang sama, yaitu : Proporsi komisaris independen dan Ukuran dewan komisaris.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaan sampel yang diambil. Peneliti dahulu menggunakan sampel perusahaan perbankan yang telah *go public* di BEI pada tahun 2007 – 2008.

3. Nurainun Bangun dan Vincent (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurainun Bangun dan Vincent dengan judul Analisis hubungan komponen *good corporate governance* terhadap manajemen laba dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini mengambil sample pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 – 2006. Dengan kesimpulan, sebagai berikut : 1) Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, 2) Kepemilikan

Manajemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, 3) Proporsi komisaris independen independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, 4) Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, 5) Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, proporsi komisaris independen independen, dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, 6) Manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Persamaan :

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini menggunakan empat proksi dari variable independen yang sama, yaitu : 1) Kepemilikan Institusional, 2) Kepemilikan Manajemen, 3) Proporsi komisaris independen independen, 4) Jumlah dewan komisaris.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan dan pada objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan populasi sample pada sample pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 – 2006.

4. Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan Doddy Setiawan membahas tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap

Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini menguji mekanisme *corporate governance*, seperti: komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000-2004

Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini, yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Uji yang digunakan sama, yaitu sama-sama menggunakan regresi berganda.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaan sampel yang diambil. Peneliti dahulu menggunakan sampel industri perbankan yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000 – 2004.

5. Gideon SB. Boediono (2005)

Gideon SB. Boediono membahas mengenai Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris yaitu pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan

manajemen, dan komposisi dewan komisaris baik secara bersama-sama maupun individual terhadap manajemen laba. Selain itu juga pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan komposisi dewan komisaris serta manajemen laba baik secara bersama-sama maupun individual terhadap kualitas laba. *Good corporate governance* diproksikan dengan mekanisme kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komposisi dewan komisaris.

Persamaan :

Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada pembahasan tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba. Ada beberapa kesamaan proksi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan ukuran dewan komisaris.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu objek penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komposisi dewan komisaris, manajemen laba dan kualitas laba. Sedangkan penelitian saat ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, proposisi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan manajemen laba.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya :

2.2.1 Agency Theory

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal/pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/direksi/manajemen). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal dan agen (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 6).

Menurut Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto (2004: 6) terdapat beberapa asumsi dasar yang membangun teori ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

Agency Conflict

Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara principal dan agen (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (*agen*) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (*principal*) untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan.

Agency Problem

Asumsi dasar lainnya yang membangun *agency theory* adalah *agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan *incentive* atas pengelola dan pemilik.

2.2.2 Good Corporate Governance

Good corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Dengan melakukan penerapan *good corporate governance* diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaannya yang dapat menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan *Corporate Governace* dapat diibaratkan sebagai sekumpulan hukum, perturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi sebuah perusahaan untuk menarik modal, dan sumber daya manusia, suatu operasional entitas dapat beroperasi secara efisien, sehingga perusahaan dapat menjaga kelangsungan kegiatan

operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang untuk pemegang saham dan masyarakat keseluruhan (Muh. Arief Effendi, 2009: 1).

Menurut Muh. Arief Effendi (2009: 4) prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi:

1. Transparansi

Keterbukaan didalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi secara materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan

Penyajian informasi kepada pihak pemangku kepentingan yang dimana berisikan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

3. Kemandirian

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.

5. Pertanggungjawaban

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat.

6. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul akibat dari perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan prinsip - prinsip *corporate governance* yang dinyatakan oleh FCGI diantaranya mencakup (1) hak - hak pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan serta dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan - perubahan yang sifatnya mendasar, (2) perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham termasuk minoritas dan asing serta melarang perdagangan oleh pihak dalam, (3) peranan pemegang saham harus diakui sesuai ketentuan hukum dan perusahaan mendorong terciptanya kerjasama antar pihak berkepentingan untuk menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari sisi keuangan.

2.2.3 Hubungan Teori Agensi dengan Struktur Corporate Governance

pada Pengelolaan Perusahaan

Teori agensi berhubungan dengan proses pembentukan *governance system* sebuah perusahaan yang akan menjembatani adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola dalam suatu perusahaan khususnya dalam hal tugas, wewenang, dan fungsi-fungsi lainnya. Pemisahan ini menyebabkan fungsi masing-masing menjadi jelas dimana pemilik yang mengharapkan aset yang diinvestasikan berkembang baik dan menghasilkan laba, sedangkan pengelola akan menjaga setiap aset yang dikelolanya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemilik atau pemegang saham (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 9).

Praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (*transparancy*) sehingga memaksimalkan laba perusahaan tidak menimbulkan *vested interest* yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan ini juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dengan manajemen serta antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 9).

2.2.4 Corporate Governance Framework

Menurut Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto (2004: 16) Setiap negara memiliki *corporate governance code* masing-masing, pada prinsipnya ada beberapa aspek universal corporate governance framework yang terdapat pada masing-masing kode tersebut, meliputi:

1. Tujuan Korporasi (*corporate objective*)

Korporasi sudah seharusnya berusaha menjamin kelangsungan hidupbisnisnya dalam jangka panjang dan mengelola hubungan dengan *Stakeholder* secara efektif. Korporasi seharusnya mengungkapkan informasi dengan akurat, memadai, dan tepat waktu juga bersikap transparan terhadap investor tentang akuisisi, hak dan kewajiban kepemilikan, serta penjualan saham.

2. Hak Suara (*Voting Right*)

Pemegangan saham biasa mengeluarkan satu suara untuk satu saham. Korporasi seharusnya menjamin hak pemilik untuk memberikan suara. Regulator seharusnya memfasilitasi hak memberikan suara dan mewajibkan adanya disclosure yang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang tepat waktu.

3. *Non-executive Corporate Board*

Terdapat desakan yang kuat agar *board* melibatkan anggota *non-executive* yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. *Non-executive* yang independen sebaiknya tidak kurang dari dua anggota (tergantung besaran board) dan sama banyaknya dengan

substantial majority. Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi sebaiknya mayoritas beranggotakan *non-executives* yang independen.

4. Kebijakan Remunerasi Korporasi (*Corporate Remuneration Policies*)

Dalam setiap laporan tahunan korporasi seharusnya mengungkapkan (*disclose*) kebijakan board tentang remunerasi sehingga investor dapat memutuskan apakah praktik dan kebijakan remunerasi tersebut telah sesuai dengan standar, kepatuhan, dan kepatantasan.

5. Fokus Strategik (*Strategic Focus*)

Modifikasi strategik yang penting bagi bisnis utama (*core business*) seharusnya tidak dibuat bila modifikasi yang diusulkan tidak disetujui shareholders. Demikian juga bila terjadi perubahan penting korporasi yang mendasar dan secara material berpengaruh melemahkan ekuitas atau mengikis economic interest atau hak kepemilikan saham dari *shareholders* yang ada.

6. Kinerja Operasional (*Operating Performance*)

Corporate governance framework seharusnya memfokuskan perhatian board pada hal-hal yang berkaitan dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

7. Shareholders Returns

Corporate governance framework seharusnya memfokuskan perhatian board pada pengoptimalan return kepada shareholders.

8. *Corporate Citizenship*

Korporasi harus taat kepada berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku pada wilayah hukum di mana korporasi tersebut beroperasi.

9. *Implementasi Corporate Governance*

Apabila di suatu negara telah ada code yang menjadi rujukan atau pedoman praktik *good corporate governance (GCG)*, maka code tersebut harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut.

2.2.5 Konsep indikator maksime *Good Corporate Governance*.

Prilaku manipulasi oleh manajer yang berupa *earning management* dan berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui mekanisme yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut, salah satunya adalah mekanisme *corporate governance* (Arya Pradipta, 2011). Unsur-unsur mekanisme *corporate governance* dari penelitian ini, meliputi :

1. *Kepemilikan Institusional*

Menurut Bushee (1998) dalam Gideon SB. Boediono (2005) Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary*

dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan Institusional ditunjukkan dengan prosentase kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan rumus :

$$KI = \left(\frac{\text{Saham Institusi}}{\sum \text{Lembar Saham Beredar}} \right) \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajemen

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajemen. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan, menurut (Jensen dan Meckling, 1976; Mork et al., 1989 dalam Gideon SB. Boediono, 2005).

Kepemilikan Manajemen dapat diukur dengan rumus :

$$KM = \left(\frac{\sum \text{Saham Direksi \& Komisaris}}{\sum \text{Lembar Saham Beredar}} \right) \times 100\%$$

3. Proporsi Komisaris Independen

Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah

mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49).

Proporsi Komisaris Independen dapat diukur dengan rumus :

$$\text{PKI} = \left(\frac{\text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Komisaris}} \right) \times 100\%$$

4. Ukuran Dewan Komisaris

Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996), dan Jensen (1993) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar, ukuran dewan komisaris berukuran besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam berkomunikasi, koordinasi, serta pembuatan keputusan.

Ukuran Dewan Komisaris dapat diukur dengan rumus :

$$\text{UDK} = \text{JUMLAH DEWAN KOMISARIS}$$

2.2.6 Manajemen Laba

William R. Scoott (2000: 369) menyatakan bahwa “*earning management is the choice by manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*” dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan tertentu disebut dengan manajemen laba. Terkait dengan informasi laba pada *Statemen of Financial Accounting Concept (SFAC)* No. 1 yang menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja dan pertanggungjawaban manajemen (Welvin I Guna dan Arleen Herawaty, 2010). Schipper (1989) dalam Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai proses dilakukannya langkah-langkah yang disengaja dalam batasan prinsip-prinsip akuntansi untuk memperoleh tingkat pendapatan yang diinginkan. Healy dan Wahlen (1999) dalam Arya Pradipta (2011) juga menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan transaksi sebagai kinerja perusahaan dengan tujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham (*shareholders*), atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang berdasarkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan

seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Dalam Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010), Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk merubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pemegang saham dalam menilai prestasi ekonomi yang dicapai oleh perusahaan.

2.2.7 Deteksi Manajemen Laba secara Kuantitatif

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktifitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar-besaran.

Pada deteksi ini, fokus pembahasan terletak pada penjelasan model-model deteksi manajemen laba yang banyak digunakan dalam riset empiris. Model-model tersebut diantaranya adalah *Jones Model* (1991), *Modified Jones Model* (1995), *Kaszinik Model* (1999), dan *performance-Matched Discretionary Accruals Model* yang ditentukan oleh Kothari dan kawan-kawan (2005) (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi, dan Liza Alivia, 2011: 70).

Secara detail, dengan JM, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen laba dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan nilai total akrual (TA) dengan formulasi:

$$\mathbf{TAit = NIit - CFOit}$$

2. Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 dan α_3 dengan formulasi:

$$\mathbf{TAit = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPEit + \epsilon it}$$

Lalu, untuk mensakala data, semua variable tersebut dibagi dengan asset tahun sebelumnya (Ait) sehingga formulasinya berubah menjadi:

$$\mathbf{TAit / Ait-1 = \alpha_1(1/Ait-1) + \alpha_2(\Delta R_{evit}/Ait-1) + \alpha_3(PPEit/Ait-1) + \epsilon it}$$

3. Menghitung nilai akrual nondiskresioner (NDA) dengan formulasi:

$$\mathbf{NDAit = \alpha_1(1/Ait-1) + \alpha_2(\Delta R_{evit}/Ait-1 - \Delta R_{ecit}/Ait-1) + \alpha_3(PPEit/Ait-1) + \epsilon it}$$

4. Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan nondiskresioner, dengan formulasi:

$$\mathbf{DAit = TAit + NDAit}$$

Discretionary accrual adalah komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Komponen *discretionary accruals* merupakan bagian dari akrual yang memungkinkan intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek (Welvin I Guna dan Arleen Herawaty, 2010).

2.2.7 Hubungan indikator mekanisme *Good Corporate Governance*

dengan Manajemen Laba

1. Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Bangun dan Vincent, 2008). McConell (1990); Nesbitt (1994); Smith (1996); Del Guercio dan Hawkins (1999); Hartzel dan Starks (2003); dan Cornertt et al., (2006) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Tindakan pengawasan perusahaan lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan

mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan dirinya sendiri, (Coernertt et al., 2006 dalam Nurainun Bangun dan Vincent, 2008).

2. Kepemilikan Manajemen dan Manajemen Laba.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan memengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon SB. Boediono, 2005).

3. Proporsi komisaris independen Independen

Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan

yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49). Fama dan Jensen (1983) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independent) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

4. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan, hilangnya independensi komisaris dalam pengambilan keputusan akan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004:33). Yermack (1996); Beasley (1996); dan Jensen (1993) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam berkomunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari sebuah penelitian dalam menjawab masalah penelitian dan dinyatakan dalam sebuah skema atau gambar yang menjelaskan pokok-pokok unsur penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, peneliti menggunakan pengukuran kualitas *corporate governance* yang diukur oleh beberapa konsep indikator mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari:

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Nurainun Bangun dan Vincent, 2008). McConell (1990); Nesbitt (1994); Smith (1996); Del Guercio dan Hawkins (1999); Hartzel dan Starks (2003); dan Coernertt et al., (2006) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Tindakan pengawasan perusahaan lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan dirinya sendiri, (Coernertt et al., 2006) dalam (Nurainun Bangun dan Vincent, 2008). Dari kajian teori yang diterurai diatas maka dapat dikatakan, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba dari proses pengawasan atau

monitoring yang dilakukan oleh pihak investor institusional, sehingga perilaku manajemen yang mementingkan kepentingannya sendiri atau perilaku *opportunistic* dapat dibatasi.

2) Kepemilikan Manajemen

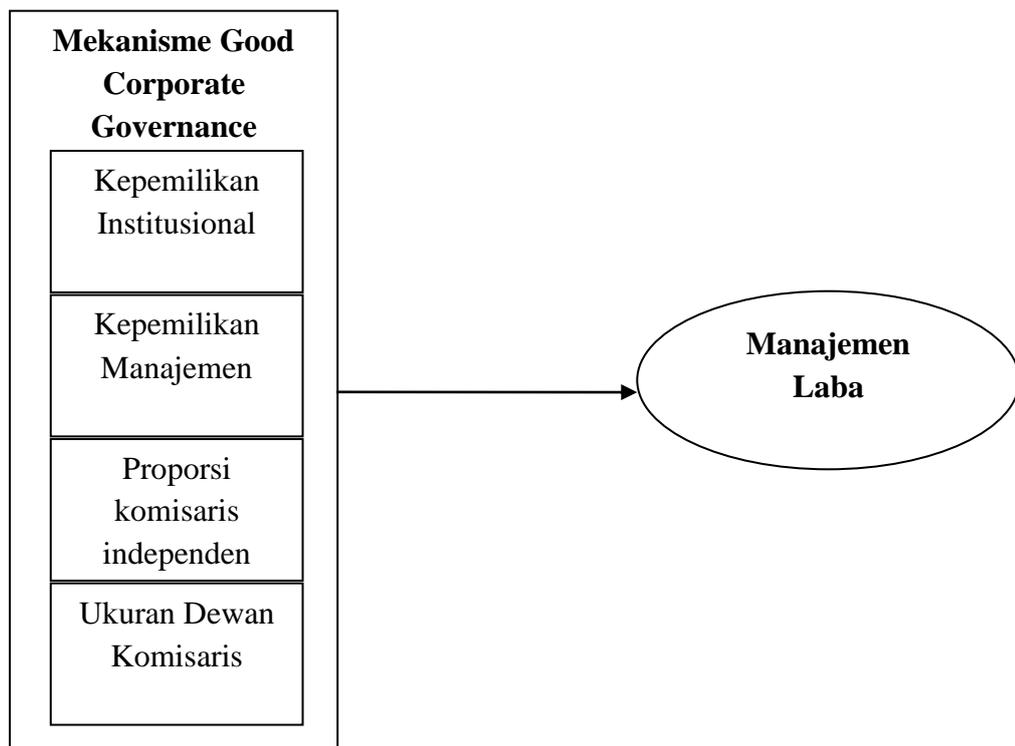
Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon SB. Boediono, 2005). Dari kajian teori yang terurai diatas, maka dapat dikatakan kepemilikan manajemen atau saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat mempengaruhi perilaku manajemen laba, karena dengan adanya saham yang dimiliki oleh manajemen maka perilaku manajemen yang mementingkan kepentingannya ini dapat dibatasi oleh pihak manajemen itu sendiri.

3) Proporsi komisaris independen

Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49). Fama dan Jensen (1983) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Dari kajian teori yang terurai diatas, maka dapat dikatakan proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba dengan mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan nasihat kepada pihak manajemen, sehingga proporsi komisaris independen ini dapat membatasi perilaku manajemen yang mementingkan kepentingannya untuk melakukan tindakan manajemen laba pada perusahaan.

4) Ukuran Dewan Komisaris.

Yermack (1996); Beasley (1996); dan Jensen (1993) dalam Nurainun Bangun dan Vincent (2008) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam berkomunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Dari bahasan teori diatas dapat dikatakan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris pada perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun rumusan hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

- H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H2 : Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H3 : Proporsi komisaris independen independen berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.